

Tantangan Dan Harapan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Maluku Sebagai Daerah Kepulauan

Perjuangan untuk membentuk Provinsi Kepulauan Maluku, dihadapkan pada tantangan dan hambatan. Pandangan yang berbeda tentang konsep provinsi kepulauan merupakan hal yang wajar karena datang dari pemikiran berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu pengembangan kawasan kepulauan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, berada pada ruang wilayah darat dan laut (perairan) dalam kawasan kepulauan secara efektif, efisien dan produktif melalui setiap kebijakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan penduduk, bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa Maluku sebagai provinsi kepulauan hendaknya dipahami sebagai suatu Kawasan Produksi Kepulauan yang diorientasikan ke arah lautan (perairan) dan daratan secara terintegrasi dan proporsional.

Secara umum potensi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku terbagi dalam lima sektor utama yaitu perikanan, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan energi. Lima sektor ini belum tergarap maksimal, baik oleh masyarakat dan juga investor. Potensi inilah yang bisa dimanfaatkan investor dalam maupun luar negeri sehingga menimbulkan “efek berganda” (multipilier effect) bagi perkembangan maluku, khususnya masyarakat maluku di masa mendatang. Maluku memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang sangat besar. Selain menawarkan panorama bahari yang mempesona, maluku memiliki lautan yang indah serta belum terjamah, cocok untuk mengembangkan resort-resort berkelas. Untuk potensi perkebunan, Maluku sudah terkenal beratus-ratus tahun lalu, mulai dari komoditas pala, cengkih dan juga kelapa yang sudah diperdagangkan ke seluruh dunia sejak masa Portugis menguasai Maluku. Sedangkan untuk pertambangan, Maluku memiliki potensi pertambangan emas, nikel dan tembaga. Selain itu Maluku yang dilalui patahan geologi bumi menyimpan cadangan minyak bumi dan panas bumi yang belum terekplorasi secara maksimal. Jika dahulu Maluku dicari karena kekayaan rempahnya, kini dicari karena

potensi kekayaan migas yang sangat luar biasa. Provinsi Maluku kini menjadi incaran dan perhatian dunia.

Dengan potensi sumber daya alam migas itu, seharusnya Maluku bisa merdeka dari kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, provinsi Maluku yang berpenduduk 1.6 juta, 18,84 persen atau 307 jiwa adalah penduduk miskin dan menempati urutan keempat setelah Papua, Papua Barat, dan NTT. Dengan potensi migas dari laut dalamnya seharusnya Maluku bisa bebas dari kemiskinan dan menjadi daerah yang maju dan sejahtera dengan kekayaan alamnya.

Potensi yang sangat besar adalah Blok Masela yang terletak di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Blok ini, jika berproduksi 1-2 tahun lagi, akan jadi sangat luar biasa. Untuk itu Maluku perlu diberikan otonomi khusus kelautan dengan kewenangan bagi Maluku untuk mengelola kekayaan lautnya, karena tanpa kewenangan pengelolaan laut, Maluku akan tetap miskin, mengingat wilayah daratannya kurang dari 10 persen. Dari potret ini, walaupun Maluku memiliki sumber daya alam yang melimpah namun sampai saat ini belum terkelola secara optimal. Sebagai contoh Maluku yang memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah (ikan), telah dicanangkan sebagai lumbung ikan nasional beberapa waktu lalu. Tetapi sampai saat ini, pemerintah belum menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Hal yang cukup memprihatinkan dan disayangkan ialah Maluku ditetapkan sebagai salah satu Provinsi yang termiskin di Indonesia. Sangat miris, dan menggugah hati, karena Maluku yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah dan selama ini digarap habis-habisan demi kepentingan pembangunan nasional, tetapi kenyataan yang terjadi masyarakatnya tetap dan tetap miskin. Ada kebijakan yang keliru, sehingga membutuhkan langkah bijaksana secara terpadu dan terarah, berdasarkan komitmen yang kuat, konsisten dan konsekuen dari setiap pengambil keputusan atau kebijakan yang berkompeten. Pada sisi lain sumber kekayaan alam Maluku belum dijadikan sebagai instrumen dalam mendorong peningkatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun yang tidak terbantahkan bahwa dimana banyak sumber daya alam selalu saja timbul konflik, menjadi kenyataan di negeri seribu pulau ini. Hal ini

perlu menjadi perhatian, pemerintah supaya berupaya untuk mengeleminir konflik sehingga pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika dibiarkan berlarut-larut maka pasti berbagai kepentingan akan didorong untuk ikut menggapai berbagai tujuan sesaat dari kelompok tertentu, dengan cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

Politik pembangunan nasional, yang belum sepenuhnya mengarah pada percepatan pembangunan diwilayah kepulauan dan tertinggal mengakibatkan berbagai ketimpangan yang harus dieleminir melalui langkah-langkah konkrit dan bermanfaat. Wilayah kepulauan membutuhkan perhatian serius, karena masalah yang dihadapi sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk membangun Maluku yang aman damai dan sejahtera.

Yang diharapkan., *pertama* Maluku harus mampu bangkit dan keluar dari kondisi kemiskinan sehingga dapat maju, mandiri dan sejahtera, sejajar dengan Provinsi lain di Indonesia. *Kedua* Pola kebijakan pembangunan nasional harus mampu mendorong percepatan pembangunan di Maluku. *Ketiga* kebijakan pembangunan yang memberikan jaminan bagi perdamaian sejati dan langgeng di Maluku.